ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Tesis)

Oleh

DESI PUSPITAWATI

MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh

DESI PUSPITAWATI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung)

Oleh

Desi Puspitawati

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian akuntansi pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penentuan sampel melalui *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 96 responden. Analisis data menggunakan *SmartPLS* melalui *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis.

Hasil analisis menunjukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung. Sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCED THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORT

(Emperical Studies in The Municipal District in Lampung Province)

By

Desi Puspitawati

This research aim to analyze the influence of independent variabels Competence of Human Resources (SDM), Implementation of Government Internal Control System (SPIP), Implementation of Government Accounting Standards (SAP), and the utilization of information technology (TI), to the Quality of Regional Financial Report (LKPD).

Type of data uses in this research is primary data which have been obtained from questionnaires which are directly distributed to the respondents who are the head and the staffs of accounting division on financial and asset management services area (BPKAD) in the municipal district in Lampung province. Sampling through purposive sampling and obtained of 96 respondents. Analysis of data using SmartPLS through outer, inner model and hypothesis testing.

Result of Hypotesis testing indicates have an effect positive of Human Resources, Government Internal Control System, to the Quality of Regional Financial Report in Lampung. While the Implementation of Government Accounting Standards and the utilization of information technology has no information to the Quality of Regional Financial Report in Lampung.

Keywords : Quality of Regional Financial Report, Human Resources, Implementation of Government Internal Control System, Implementation of Government Accounting Standards, and the utilization of information technology.

Judul Tesis	:	**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
Nama Mahasiswa	:	**Desi Puspitawati**
No. Pokok Mahasiswa	:	1421031018
Program Studi	:	Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.	**Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.**
NIP 19740922 200003 2 002	NIP 19580919 199501 1 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

   Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.** .....

   Sekretaris : **Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.** .....

   Sekretaris : **Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

   Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
   NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana

   Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
   NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **22 Desember 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Desember 2016

Pembuat Pernyataan,

Desi Puspitawati

NPM. 1421031018

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Metro pada tanggal 10 Februari 1978, sebagai putri keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sukarjo (Alm) dan Ibu Tati Sugiarti (Almh).

Penulis menempuh pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Metro. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Metro. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Yos Sudarso Metro dengan jurusan IPA Fisika. Penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro.

Saat ini penulis bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2010, kemudian ditahun 2014 penulis mendapat kesempatan untuk studi lanjut pada program S2 Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Lampung melalui program Beasiswa STAR BPKP.

MOTTO

Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Teruslah belajar untuk menjadi BAIK, Lebih BAIK dan TERBAIK.

Pantang menyerah, berusaha sekuat tenaga, semua akan indah pada waktunya.

Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran.

(HR. Ahmad)

Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika itupun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti.

(Imam Syafi'i)

Berjalanlah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas adalah obat dari segala obat.

I'm not alone, Allah is always with me.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini sebagai salah satu

- Tanda syukurku kepada Allah SWT
- Tanda baktiku kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Sukarjo (Alm) dan Ibu Tati Sugiarti (Almh), yang dalam proses studiku ini telah berpulang ke Rahmatullah, teriring doa untuk kedua orangtuaku, Al Fatehah
- My beloved husband "Bripka Joko Susilo, S.Ip" imam terbaikku, terimakasih atas support dan pengertiannya selama ini
- Kakakku dan adikku tersayang, terimakasih atas nasihat dan perhatiannya selama ini

I LOVE YOU ALL

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'aalamin serta syukur yang mendalam Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **" Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".**

Tesis ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan demi kesempurnaan penulisan ini. Dengan adanya bimbingan, keteladanan serta bantuan dari berbagi pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sartia Bangsawan, S.E., M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet,M.B.A., Ph.D., Akt selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan waktunya yang luar biasa selama penyusunan tesis;
4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan dukungan, saran dan waktunya selama penyusunan tesis
5. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis;

6. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku pembahas II yang juga telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang selama kuliah telah memberikan Ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
8. Ibu Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt., dan Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., terimakasih atas segala perhatian dan supportnya.
9. Pengelola dan karyawan serta karyawati Mas Andre, Mbak Lenny, Mbak Tina dkk yang telah ikut membantu kelancaran perkuliahan;
10. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Sukarjo (Alm) semoga seluruh peluh dan tetesan keringat yang bapak keluarkan dalam perjuangan mencari nafkah untuk kami senantiasa berkah dan dibalas dengan Surga dan Ibu Tati Sugiarti (Almh) yang senantiasa mendoakanku dalam setiap dzikir dan doanya, semoga setiap air mata yang jatuh dari mata ibu atas segala kepentinganku menjadi sungai untuk ibu di Surga. Aamiin.
11. Kakak-kakakku Mba Neti, Mba Dewi, Mas Joko, Adikku Ari, yang selalu menyayangiku, terimakasih atas segala nasihat dan perhatiannya.
12. Suamiku tercinta Bripka Joko Susilo, S.Ip., yang selalu support dan penuh pengertian serta selalu menemani dalam penyusunan Tesis;
13. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I, Pak Acep, Mba Ani, Dani, Feria, Mba Dewi, Teh Lilis, Reny, Wowon Dwi Laila, Heny, Mega, Maisaroh, Juwe, Mas Windy, Eva, Anifa, Firda, Ida, Mba Endang, Nani, Opi, Nurul, Mas Sidiq, Fadri, Pak Sukani, Pak Zayendra, dan Pak Narso (Alm), yang selalu kompak dalam segala hal, terimakasih untuk suka duka serta kebersamaannya;

14. Bapak Madani selaku kepala BPKAD, Ibu Sari selaku kasubid, Ibu Happy, Ibu Eva dan Bapak Yudi selaku Kasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Mba Supriyati dan semua rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua...Aamiin...

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

Desi Puspitawati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 9

2.1. Teori Stewardship 9
2.2. Kualitas Laporan Keuangan 10
2.3. Kompetensi SDM 13
2.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 15
2.5. Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 16
2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi 17
2.7. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 18
    2.7.1. Penelitian Terdahulu 18
    2.7.2. Pengembangan Hipotesis 19
        2.7.2.1. Pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD 19
        2.7.2.2. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kualitas LKPD 20
        2.7.2.3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD 21
        2.7.2.4. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD 22
2.8. Model Penelitian 23

BAB III. METODE PENELITIAN 24

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 24
    3.1.1. Populasi Penelitian 24
    3.1.2. Sampel Penelitian 24
3.2. Data Penelitian 25
    3.2.1. Jenis dan Sumber Data 25
3.3. Definisi Operasional Variabel 26
    3.3.1. Variabel Dependen 26
    3.3.2. Variabel Independen 26
3.4. Analisis Data 30
3.5. Model *Measurement* (*Outer Model*) 31
    3.5.1. Uji Validitas 31
    3.5.2. Uji Reliabilitas 32
3.6. Model Pengukuran Struktural (*Inner Model*) 32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....34

4.1. Analisis Deskriptif Data dan Responden 34
4.2. Demografi Responden.....36
4.3. Deskripsi Statistik 37
4.4. Hasil Uji PLS 46
4.4.1. Model *Measurement* (*Outer Model*).....46
4.4.2. Model Struktural (*Inner Model*) 51
4.4.3. Pengujian Hipotesis 52
4.5. Pembahasan.....54
4.5.1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD 54
4.5.2. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kualitas LKPD 56
4.5.3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD.....57
4.5.4. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD.....58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....60

5.1. Kesimpulan 60
5.2. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung.....3

Tabel 4.1. Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....35

Tabel 4.2. Deskriptif Data.....35

Tabel 4.3. Informasi Umum Responden Penelitian.....36

Tabel 4.4. Hasil Kuesioner Responden Terhadap Kompetensi SDM.....37

Tabel 4.5. Hasil Kuesioner Responden tentang Penerapan SPIP.....39

Tabel 4.6. Hasil Kuesioner Responden tentang Penerapan SAP.....41

Tabel 4.7. Hasil Kuesioner Responden tentang Pemanfaatan TI.....43

Tabel 4.8. Hasil Kuesioner Responden tentang Kualitas LKPD.....45

Tabel 4.9. Hasil Uji *Convergent Validity*.....46

Tabel 4.10. Hasil Uji *Discriminant Validity*.....47

Tabel 4.11. Hasil Uji *AVE*.....49

Tabel 4.12. Hasil Uji *Composite Reliability*.....49

Tabel 4.13. Hasil Uji *Cronbachs Alpha*.....50

Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2.....51

Tabel 4.15. Pengaruh variabel laten.....53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Daftar Nama Kabupaten Kota di Provinsi Lampung

Lampiran 3 Karakteristik Responden

Lampiran 4 Jawaban Responden

Lampiran 5 Hasil Bootstraping

Lampiran 6 Hasil Uji PLS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 36 Ayat (1) menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan basis kas yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, oleh karena itu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan daerah, terutama mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dapat dikatakan bernilai apabila dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan pemerintah yang

informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari opini BPK atas pelaporan keuangan.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Lampung pada Triwulan II tahun 2015 telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 untuk seluruh 16 entitas pemeriksaan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Opini laporan keuangan Pemerintah daerah se- Provinsi Lampung pada tahun 2014 ada sembilan yang mendapat peringkat WTP, enam WDP, kemudian satu Kabupaten yang tidak di berikan predikat yakni di Kabupaten Pesisir barat. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung merupakan hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut, karena masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan hasil rekapitulasi opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2014

No	Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK
1	Provinsi Lampung	WTP
2	Kota Bandar Lampung	WTP
3	Kota Metro	WTP
4	Kabupaten Way Kanan	WTP
5	Kabupaten Lampung Barat	WTP
6	Kabupaten Tanggamus	WTP
7	Kabupaten Tulang Bawang	WTP
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat	WTP
9	Kabupaten Mesuji	WTP
10	Kabupaten Pringsewu	WDP
11	Kabupaten Pesawaran	WDP
12	Kabupaten Lampung Utara	WDP
13	Kabupaten Lampung Tengah	WDP
14	Kabupaten Lampung Timur	WDP
15	Kabupaten Lampung Selatan	WDP
16	Kabupaten Pesisir Barat	TMP

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Tahun 2015

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Adanya kelemahan sistem pengendalian intern; (b) Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib; (c) Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; (d) Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (e) Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan; (f) Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah (BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Tahun 2015).

Obyek pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mendapat predikat WTP dan WDP. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil

Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesisir Barat. BPK juga menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. (BPK Perwakilan Provinsi Lampung).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD diantaranya sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta pemanfaatan teknologi informasi (Nordiawan, 2006; Bastian, 2006; Indriasih, 2014).

Simanjuntak (2005) menyatakan SDM merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia. SKPD harus memiliki SDM yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi baik, dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan prilaku SDM yang bersangkutan (Ruky, 2003; Sudarmanto, 2009; Indriasih, 2009).

Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemanfaatan teknologi informasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Wilkinson *et al* (2000) teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Sistem informasi akuntansi meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai. Komputer digunakan pada seluruh jenis sistem informasi. Teknologi informasi mencakup komputer, juga mencakup teknologi lain yang digunakan untuk memproses informasi (Bodnar dan Hopwood, 2000).

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektesian penggelapan (*fraud*). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Anggraeni, 2014).

Ada lima komponen dalam membangun pengendalian intern yaitu (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, (e) monitoring (Bodnar dan Hoopwod, 2000; PP Nomor 60 Tahun 2008; Aren *et al*, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menerangkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD. Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja. Penerapan SAP oleh Pemerintah Daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011).

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2014) menunjukan bahwa kualitas SDM dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nordiawan (2006) menyatakan bahwa penerapan SAP berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Xu *et al* (2003) menyatakan SDM, sistem, organisasi dan faktor ekternal merupakan faktor krisis menentukan kualitas informasi akuntansi. Hasil

penelitian ini juga mendukung temuan Alimbudiono dan Fidelis (2004) serta Indriasih (2014).

Dari beberapa *reseach gap* dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kondisi permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris kualitas LKPD dan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan variabel kompetensi SDM, penerapan SPIP, penerapan SAP, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah literatur dan bemanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan menambah referensi penelitian di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donalson dan Davis (1997) teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manager atau *steward* dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada

hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manager mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manager wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Jonas dan Blanchett (2000) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2014 menyatakan kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: (1) kesesuaian dengan SAP. (2) Kecukupan pengungkapan. (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Relevan

   Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasinya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbrda jauh.
c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Agami (2006) mengemukakan tuntutan untuk menerapkan standar akuntansi yang telah diamanatkan undang-undang. Dalam penerapan SAP ini diperlukan SDM yang handal dan memahami tentang penyusunan laporan keuangan serta sosialisasi SAP. Kompetensi SDM yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode dan ketentuan baku yang terdapat dalam SAP sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan yang berakibat laporan keuangan yang dibuat juga salah.

2.3 Kompetensi SDM

Kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang

menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni: (1) Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. (2) Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. (3) Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi, (4) Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. (5) Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan kompetensi aparatur dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan menurut Smith (2000) adalah proses terencana untuk mengubah sikap/perilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu kegiatan. Pendidikan dan pelatihan pegawai diberikan secara berkala sehingga dapat terpelihara

kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi (Donalson dan Scannel, 1993).

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern

merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. (PP No. 60 Tahun 2008).

2.5 Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual.

Penerapan SAP berbasis akrual ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksiapan ini terjadi karena: (a) kemampuan SDM yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah; (b) pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang belum intensif; (c) belum diterbitkannya peraturan daerah tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dan (d) belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mendukung terlaksananya penerapan akuntansi berbasis akrual (IHPS I, 2014).

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai obyek dalam penelitian ini sampai dengan tahun 2014 masih menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual sebagai persiapan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.

2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database,* jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup: a) pengolahan data,pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan (Anggraeni, 2014).

2.7 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Penelitian Terdahulu

Anggraeini (2014) menunjukan bahwa kualitas SDM dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemda sedangkan pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Sukmaningrum dan Harto (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan SPIP mempengaruhi kualitas LKPD.

Suhardjo dan Adhi (2013) menemukan penerapan SAP dan kualitas aparatur berpengaruh terhadap kualitas LKPD, tidak terdapat hubungan moderasi antara penerapan SAP dengan kualitas aparatur terhadap kualitas LKPD. Sedangkan penelitian Indriasih (2014) menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah dan efektifitas SPIP menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sukmaningrum dan Harto (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi SDM , sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

Zeyn (2011) menyatakan bahwa secara simultan penerapan *good governance* dan SAP berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, selanjutnya Zeyn menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* yang baik dan pemahaman serta penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Azlim (2012) yang menunjukan bahwa variabel penerapan *good governance* dan SAP secara simultan

berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan, hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa penerapan *good governance* dan SAP berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Andini (2015) menunjukan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Donnelly *et al*. (1994) menemukan bukti empiris bahwa pengembangan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap pemerintahan yang baik di Skotlandia. Xu *et al*. (2003) menyatakan bahwa SDM, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis dalam menentukan kualitas informasi akuntansi.

Arens *et al* (2012) memaparkan bahwa pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan.

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

2.7.2.1 Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Peningkatan kompetensi SDM dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu. Sukmaningrum dan Harto (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi SDM , sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

Xu et al. (2003) menyatakan bahwa SDM, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis dalam menentukan kualitas informasi akuntansi.

Penelitian mengenai kompetensi SDM dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah pernah diteliti oleh Anggraini (2014), Andini (2015), hasil penelitian-penelitian tersebut menujukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

2.7.2.2 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pengendalian intern yang diproksikan dengan integritas data, ketepatan input, prosedur otorisais, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijakan dan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualtas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Sukmaningrum, 2011). Sedangkan penelitian Indriasih (2014) menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah dan efektifitas SPIP menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung disusun berdasarkan SPI yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) secara layak sesuai dengan SAP. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

2.7.2.3 Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD di Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung telah menerapkan kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP. Pada tahun 2014 laporan keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung masih berbasis kas, ini disusun dengan menggunakan pendekatan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung yang mensyaratkan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*).

Suharjo dan Adhi (2013) menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD, tidak terdapatnya hubungan moderasi antara penerapan SAP dengan kualitas aparatur terhadap kualitas LKPD.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

2.7.2.4 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat diandalkan. Peraturan Pemeintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Donnelly et al. (1994) menemukan bukti empiris bahwa pengembangan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap pemerintahan yang baik di Skotlandia. Sedangkan Anggraini (2014) menemukan pemanfaatan teknologi informasi dan SPI akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

2.8. Model Penelitian

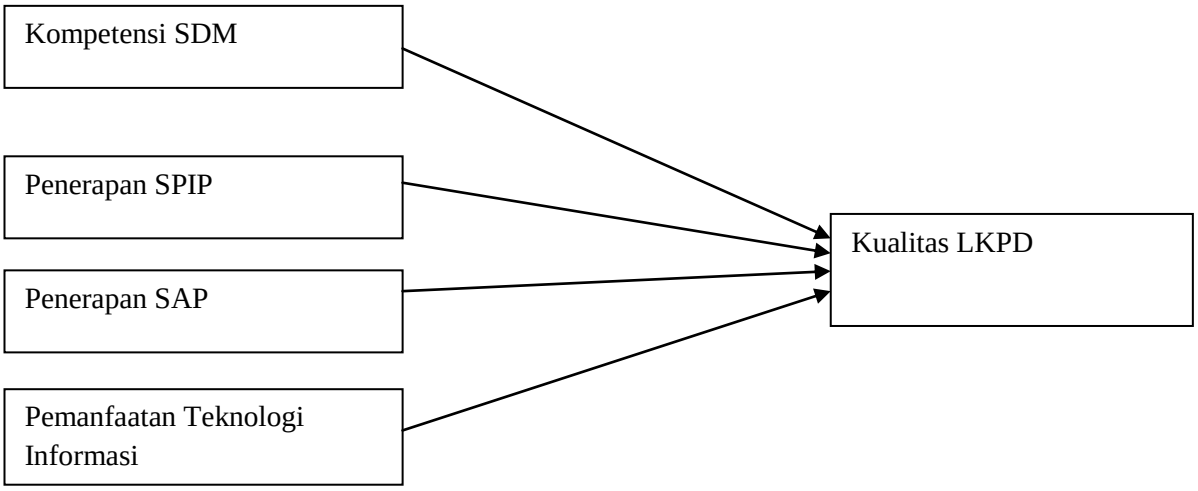

Model Faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Model ini menggambarkan pengaruh variabel independen yang terdiri dari empat variabel yaitu Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, Penerapan SAP, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel dependen Kualitas LKPD.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) pada Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 14 kabupaten/kota. Dipilihnya institusi ini sebagai objek penelitian karena BPKAD/DPPKAD sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan belum dapat diselenggarakan di masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, penyelenggaraan kegiatan pelaporan keuangan masih dilaksanakan secara terpusat oleh BPKAD/DPPKAD. Alasan inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian di BPKAD/DPPKAD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Sampel yang diambil adalah pegawai yang bertugas di bagian akuntansi di BPKAD/DPPKAD yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Status pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Lama bekerja dibagian yang sama minimal 1 (satu) tahun.
3. Jumlah SKPD sebanyak 14 (empat belas) dengan masing-masing 7 (tujuh) responden pada setiap SKPD, kecuali Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) responden hal ini dikarenakan minimnya jumlah pegawai pada bidang akuntansi, sehingga total sampel sebanyak 96 orang.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode survei, yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada para pegawai di bidang akuntansi di BPKAD/DPPKAD dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 96 lembar kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian A yang berisi pertanyaan tentang keterangan pribadi responden, sedangkan bagian B berisi pertanyaan yang merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, dengan menggunakan skala likert lima poin yaitu: 1= sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 2 = netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju (SS).

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner langsung kepada pegawai di bidang akuntansi sebagai responden dengan tujuan mengurangi kemungkinan tidak kembalinya angket penelitian. Dari 96 kuesioner yang dibagikan, seluruhnya lengkap dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, diukur dengan skala likert lima dengan menggunakan lima indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu:

(1) Laporan keuangan disajikan dengan relevan

(2) Laporan keuangan disajikan dengan andal

(3) Laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami

(4) Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan

(5) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD

3.3.2 Variabel Independen

1. Kompetensi SDM

Kompetensi SDM dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki sub bagian akuntansi/keuangan di BPKAD/DPPKAD pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas , yang diukur melalui skala likert lima dengan menggunakan delapan indikator yang mengacu pada laporan akhir studi *GTZ & USAID/CLEAN Urban* (2001) yaitu:

1. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup
2. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.

3. Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
4. Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
5. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
6. Subbagian keuangan/akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.
7. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
8. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, dan pelatihan yang dibutuhkan.

2. Penerapan SPIP

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan yang andal, menjamin ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta keandalan dalam penyusunan laporan keuangan. Variabel ini diukur melalui skala likert lima dengan menggunakan lima indikator (integritas data, ketepatan posting dan input data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, tersimpanya dokumen sumber data, dan pembagian tanggung jawab) yang mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu:

1. Integritas data dan dokumen tersimpan dengan baik.
2. Pengelola keuangan telah mencatat transaksi keuangan dengan memposting secara tepat pada buku jurnal setiap transaksi keuangan dengan bukti yang valid

3. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.
4. Perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap pencatatan akuntansi dan bukti-bukti data yang ada.
5. SKPD mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas pegawai instansi pemerintah secara tertulis yang menggambarkan pembagian kewenangan dan pemisahan tugas yang jelas.

3. Penerapan SAP

Penerapan SAP oleh sub bagian akuntansi/keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Variabel ini diukur melalui skala likert lima dengan menggunakan lima indikator dari penerapan SAP (akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja) yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. yaitu:

1. Laporan Keuangan disusun/disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan secara periodik.
2. Laporan Keuangan disusun/disajikan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan untuk kepentingan masyarakat.
3. Laporan Keuangan disusun/disajikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat secara menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Laporan Keuangan disusun/disajikan membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.
5. Laporan Keuangan disusun/disajikan dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Variabel ini diukur melalui skala likert lima dengan menggunakan lima indikator yaitu (kemajuan informasi komunikasi, perkembangan web dan teknologi internet, perubahan sistem pelaporan, sarana dan prasarana yang memadai dan pemeliharaan yang teratur) yang mengacu pada PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yaitu:

1. Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah dan akurat.
2. Jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan telah terpasang di unit kerja .
3. Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Subbagian pengelola keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas.
5. Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan *software Smart PLS* yang dijalankan dengan media komputer. PLS *Path Modeling* dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural (SEM) yang dasar teorinya lemah. PLS *Path Modeling* berbasis varian berbeda dengan metode SEM dengan *software* AMOS, Lisrel, EQS menggunakan basis kovarian.
SEM berbasis varian bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori, karena itu *PLS* merupakan alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk pengembangan teori. *PLS* juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten. Penggunaan PLS menggunakan model *measurement* (*Outer Model*) dan model *structural* (*Inner Model*). Menurut Ghozali (2014) menjelaskan *PLS* adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mendasarkan pada asumsi data harus dengan skala pengukuran, distribusi data dan jumlah sampel tertentu yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Dalam PLS *Path Modeling* terdapat dua model yaitu outer model dan inner model. Inner Model yaitu model struktural yang menghubungkan antara variabel laten, sedangkan *Outer Model* yaitu model pengukuran yang

menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Kriteria uji dilakukan pada kedua model tersebut.

3.5 *Model Measurement* (*Outer Model*)

Outer Model (*Model Measurement*)

Model ini menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya, outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.

Persamaan *outer* model (Ghozali, 2014) adalah:

$X = \Pi x\xi + \varepsilon x$ .....[1]

$Y = \Pi y\eta + \varepsilon y$ .....[2]

Keterangan:
x dan y= matriks variabel manifes independen dan dependen
ξ dan η = matriks konstruk laten independen dan dependen
Π = matrik koofesien (*matriks loading*)
ε = matriks *outer* model residu

Uji yang dilakukan pada outer model yaitu:

3.5.1 Uji Validitas

- *Convergent Validity*, nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan >0,7.
- *Discriminant Validity*, nilai ini merupakan nilai cross loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.

- *Average Variance Extracted* (AVE), nilai AVE yang diharapkan > 0,5

  Rumus perhitungan AVE adalah:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 \sum ivar(\varepsilon i)}$$

  Keterangan:
  λi = faktor loading
  $var(\varepsilon i)$ = $1 - \lambda_i^2$

3.5.2 Uji Reliabilitas

- *Cronbach's alpha* , mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Nilai yang diharapkan > 0,7.
- *Composite reliability*, mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Data yang memiliki *Composite reliability* > 0,8 mempunyai reliabilitas yang tinggi.

  Rumus menghitung *Composite reliability* (Ghozali, 2014) adalah:

$$Pc = \frac{(\sum \lambda i)^2}{(\sum \lambda i)^2 + \sum ivar(\varepsilon i)}$$

  Keterangan:
  λi = faktor loading
  $var(\varepsilon i)$ = $1 - \lambda_i^2$

3.6 Model Pengukuran Struktural (*Inner Model*)

Berdasarkan teori substantif *inner model* menggambarkan hubungan antar variabel laten. Model struktural dalam *smart PLS* dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, nilai koofesien *path* atau *t-value* tiap *path* untuk uji signifikan antar konstruk dalam model struktural.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil R^2 sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 mengindikasikan bahwa model "baik", "moderat", dan "lemah" (Ghozali, 2014). Persamaan *inner model* adalah:

$\eta = \eta\beta + \xi\Gamma + \zeta$

Keterangan:
η = matriks konstruk laten endogen
β = koefisien matriks variabel endogen
ξ = matriks konstruk laten eksogen
Γ = koefisien matriks variabel eksogen
ζ = inner model residual matriks

Selain melihat nilai *R-square,* model PLS juga dievaluasi dengan *Q-square predictive relevance* untuk model konstruktif. *Q-square predictive relevance* untuk model struktural mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukan model memiliki *predictive relevance,* sebaliknya jika nilai $Q^2 < 0$ maka model kurang memiliki *predictive relevance* (Ghozali, 2014). Rumus perhitungan *Q-square* adalah:

$Q^2 = 1 – (1 - R_1^2) (1 – R2^2) .....(1 - Rp^2)$

Dimana R_1^2, $R2^2$..... Rp^2 adalah *R-square* variabel endogen.

Nilai *Q-square* yang semakin mendekati 1 berarti model semakin baik, memiliki nilai dengan rentang $0 < Q^2 < 1$.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP, berpengaruh terhadap kualitas LKPD, sedangkan penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sub bagian akuntansi maka kualitas LKPD yang dihasilkan semakin baik.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Semakin tinggi penerapan SPIP dilaksanakan, maka kualitas LKPD yang dihasilkan sub bagian akuntansi cenderung semakin baik.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pelaksanaan SAP secara konsisten sesuai dengan aturan yang

berlaku masih belum optimal pelaksanaanya sehingga cenderung menghasilkan kualitas LKPD yang kurang berkualitas.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Masih kurang maksimalnya dalam memanfaatkan TI yang ada, pemanfaatan TI belum dilaksanakan secara optimal sehingga harus lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan TI yang baik dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi sehingga mendukung kualitas LKPD yang relevan dan andal.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penelitian yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan , simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini , maka saran penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung hendaknya secara rutin mengadakan diklat penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan keuangan mengingat latar belakang pendidikan yang beragam. Kompetensi SDM dalam hal ini sub bagian akuntansi merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD. Kompetensi SDM yang tinggi melalui penerapan SPIP dan SAP yang baik dan optimal, mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.Pemahaman dan penerapan SDM atas SPIP dan SAP perlu ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah seperti komitmen organisasi serta pengalaman kerja SDM.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian didaerah lain, serta tidak hanya dilihat dari pandangan penatausahaan pemerintah tetapi juga dari sudut pandang auditor.

DAFTAR PUSTAKA

Agami, A,M. 2006. Repoting on internal control over financial reporting. The CPA Journal, Vol 76, No.11, pp. 32-34.

Alimbudiono, Ria Sandra dan Kidelis Arastyo Andono, 2004. Kesiapan SDM sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat : Renungan Bagi Akuntansi Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol.05.No.02.Hal 18-30.

Andini dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1 Vol.24 No. 1 (2015).

Anggraeni, D.T. dan Riduawan, A. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.3 No. 3 (2014).

Arens, A.A, Randal J, dan Beasly, M.S. 2012. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach. 14□ h Edition*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Azlim. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN (2012).

Badan Kepegawaian Negara. 2003. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015 IHPS I Tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015.

Bastian, I.2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Jakatra: Erlangga.

Bodnar, H.G. dan Hopwood, W.S. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I. Edisi Ke-6 . Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat.

Donalson, L. dan Scannel, E.E. 1993. *Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. "The Use and Development of Information Systems and Technologi in Scottish Local Govrment". International Journal of Public Sector Management. Vol. 7 No. 3. Hal 4-15.

Fistarini, R. 2009. Analisis Kesesuaian Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Padang terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Universitas Andalas Padang.

Ghozali, 2014. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS).* Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting.* Vol. 5, No.20 ISSN 2222-2847.

Jensen C.M. dan Meckling H.W. 1976. Theory of the firm : Manajerial behavior agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economic.*

Jonas, G. J. dan Blanchet. J. 2000, Assessing Quality of Finacial Reporting. *Accounting Horizons,* September 14,3; Pg.353.

Lane, J.E. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches.* London: SAGE Publications.

Lane, J.E. 2002. New Publik Managemen. London Taylor & Francis e-library ISBN0-203-46732-9.

Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Ruky, A.S. 2003. Sumber Daya Berkualitas – Mengubah Visi menjadi realitas. Jakarta: Gamedia Pustak Utama.

Simanjuntak, B.H. 2005. Pengatar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Peerbit FE-UI.

Smith, A. 2000. *Traning and Development In Australia*. Second Edition. Australia: Reed International Books Australia Pty Buuterworths.

Spencer, L.M. dan Spencer, S.M. 1993. *Competence Work: Model for Superior Performance*. John Wiley and Sons. Inc.

Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM : Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Suhardjo, Y. dan Adhi, D.K. 2013.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tua) *Jurnal STIE Semarang*, Vol5, No 3. ISSN : 2252-7826.

Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2011. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Undip.*

Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir. Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Peerintah Daerah dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications.* Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

Xu, H., Jeretta, H.N., Daryl, G.N. dan Lin, B. 2003.Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Studies, (http://www.Emeradinsight.com).

Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1. Hal:21-37.